

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Muhammad Rahmat

Economic Policy Specialist -
The Reform Initiatives (TRI)

Hilirisasi di Tengah Tantangan Deindustrialisasi Dini

Pemerintah baru saja menghadiri pameran industri internasional INNOPROM 2026 yang diselenggarakan di Yekaterinburg, Rusia, pada 7-9 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia yang terpilih sebagai Official Partner Country pertama di Asia Tenggara mencoba memperkuat hubungan kemitraan di bidang industri, investasi, dan bisnis dengan berbagai pelaku usaha dari Rusia dan negara-negara Eurasia.

Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah yang telah memanfaatkan ajang tersebut sebagai sarana untuk membuka peluang kerja sama baru dengan berbagai pihak internasional. Namun, terdapat dua catatan penting agar peluang kerja sama itu dapat menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan sektor industri nasional.

Pertama, kemitraan itu harus berkontribusi positif terhadap perbaikan kinerja sektor industri yang saat ini sedang menghadapi masalah deindustrialisasi dini.

Kedua, kerja sama tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat agenda hilirisasi yang menjadi pilar utama kebijakan dan strategi reindustrialisasi nasional. Selama dua dekade terakhir, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan data BPS, sumbangan sektor manufaktur terhadap PDB adalah sebesar 29,05% pada 2001, lalu menurun secara perlahan hingga 26,35% pada 2009. Pada 2010, BPS mengubah konsep dan pengukuran sektor manufaktur. Perubahan ini menyebabkan proporsi sektor manufaktur menukik menjadi 24,8%.

Namun pada periode selanjutnya, kontribusi sektor manufaktur tak kunjung membaik. Bahkan, proporsi sektor manufaktur terus merosot hingga mencapai 19,07% pada 2025.

Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja pada sektor ini cenderung stagnan. Proporsi tenaga kerja sektor manufaktur adalah sebesar 13,53% pada 2015. Sedangkan pada 2025, persentasenya berada pada angka 13,86%.

Para ekonom menyebut fenomena ini sebagai gejala deindustrialisasi dini. Menurut Dani Rodrik (2016), deindustrialisasi dini adalah penurunan proporsi output dan/atau tenaga kerja sektor manufaktur secara lebih cepat dibandingkan dengan yang dialami negara-negara maju.

Sebagai konsekuensinya, negara yang mengalami deindustrialisasi dini kehilangan kesempatan untuk melanjutkan industrialisasi pada saat level pendapatan per kapita masih jauh di bawah negara-negara maju.

Deindustrialisasi dini dipicu oleh iklim investasi yang buruk dan inkonsistensi kebijakan. Bila mengacu pada publikasi Bank Dunia yang berjudul Business Ready (B-Ready), skor kemudahan memulai usaha (business entry) di Indonesia pada 2025 adalah sebesar 65,82, jauh di bawah Malaysia (85,76) dan Vietnam (76,62).

Sedangkan mengenai konsistensi kebijakan, pemerintah kerap mengubah suatu peraturan dalam tempo yang sangat singkat, seperti dalam kasus regulasi pengupahan yang berubah 4 kali dalam 10 tahun. Kombinasi faktor-faktor ini turut memperlambat pertumbuhan investasi dan sektor industri.

Bersamaan dengan itu, kapasitas inovasi juga masih lemah. Akibatnya, daya saing industri nasional berada jauh di bawah negara-negara ASEAN lain, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Berdasarkan data yang dirilis oleh IMD World Competitiveness Center, daya saing Indonesia berada pada peringkat 48 pada 2026. Sedangkan pada tahun yang sama, Malaysia, Thailand, dan Vietnam berada pada peringkat 15, 26, dan 27.

Penguatan Agenda

Pada hakikatnya, hilirisasi merupakan salah satu strategi industrialisasi berbasis sumber daya alam. Saat ini, pemerintah sedang mendorong kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah. Kebijakan ini dapat memacu kinerja sektor industri yang dalam beberapa dekade terakhir mengalami kejumudan.

Namun, efektivitas hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak proyek yang dibangun, tapi sejauh mana hilirisasi mampu mendorong pembangunan sektor industri yang inovatif dan berdaya saing. Hal ini bisa diwujudkan dengan beberapa syarat.

Syarat pertama adalah perbaikan iklim investasi dan kepastian hukum. Hilirisasi membutuhkan lingkungan usaha yang kondusif agar industri-industri pengolahan dapat tumbuh lebih cepat. Untuk itu, setiap hambatan seperti kompleksitas perizinan akibat tumpang tindih kewenangan dan regulasi harus segera diatasi. Kebijakan dan regulasi harus dirancang secara matang agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan industri. Pemerintah perlu memastikan insentif yang diberikan memiliki daya tarik di mata investor.

Selanjutnya, hilirisasi harus berorientasi pada peningkatan daya saing. Hal ini mensyaratkan inovasi dan teknologi yang lebih maju. Atas dasar itu, pemerintah perlu memperkuat ekosistem inovasi di mana berbagai pemangku kepentingan bisa bekerja sama untuk menghasilkan temuan dan produk baru.

Di samping itu, transfer teknologi juga perlu dipastikan kelangsungannya, khususnya melalui skema kemitraan, agar efek 'limpahan teknologi' (technology spillover) dari investasi asing dapat dirasakan manfaatnya oleh domestik.

Pada titik ini, peluang kerja sama antara Indonesia, Rusia, dan Eurasia menjadi relevan. Melalui kemitraan tersebut, Indonesia dapat menyerap pengetahuan dan teknologi yang lebih maju.

Berikutnya, diversifikasi sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar yang beragam. Produk-produk hilirisasi tidak bisa hanya dibatasi pada hasil olahan tambang, seperti aluminium dan ferronickel, tetapi juga mesti mencakup bahan kimia, farmasi, obat-obatan, energi terbarukan, elektronik, mesin, dan lain-lain.

Oleh sebab itu, hilirisasi tidak boleh dibatasi pada sektor mineral, tetapi harus menjangkau sektor lain seperti pertanian dan perikanan. Keunggulan hilirisasi sektor non-mineral terletak pada karakteristiknya yang padat tenaga kerja, sehingga pengembangan proyek ini akan meningkatkan proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur.

Hilirisasi juga harus dijalankan secara inklusif, dalam arti, tidak hanya melibatkan BUMN dan korporasi swasta, tetapi juga unit usaha rakyat seperti koperasi dan UMKM melalui skema kemitraan dengan BUMN atau swasta.

Hilirisasi harus menjadi instrumen pemerataan dan tangga bagi UMKM agar bisa naik kelas. Keterlibatan UMKM sangat penting untuk memperkuat rantai pasok domestik dan memperdalam struktur industri nasional.

Seluruh ikhtiar di atas wajib ditopang oleh tata kelola yang baik, bersih, dan transparan. Kapasitas birokrasi perlu ditingkatkan agar proyek-proyek hilirisasi dapat dirancang, dieksekusi, dan diawasi secara profesional.

Koordinasi antarkementerian/lembaga harus diperkuat guna menghindari timbulnya ego sektoral dan benturan kepentingan. Selain itu, pengawasan setiap proyek perlu diperketat untuk mengurangi potensi korupsi, perburuan rente, dan penyelewengan.

Akhirnya, peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia, Rusia, dan Eurasia mesti ditempatkan di bawah payung kepentingan nasional. Di satu sisi, Indonesia tidak boleh menutup diri dalam pergaulan internasional. Namun di sisi lain, kemitraan tersebut mesti dibangun di atas prinsip kesetaraan dan kepentingan bersama.

Oleh karena itu, penjajakan kerja sama tersebut mesti memberikan kontribusi nyata bagi penguatan daya saing industri hilir, sehingga Indonesia dapat terhindar dari ancaman deindustrialisasi dini.